



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, sebagai penyesuaian arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah.

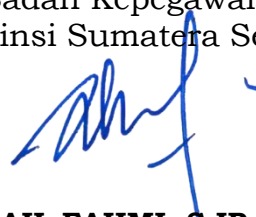
Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 disusun sebagai pedoman dan arah kebijakan Program Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang diharapkan dapat memberikan gambaran secara garis besar berbagai kegiatan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 yang mendukung Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan.

Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 ini menjelaskan juga rencana pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2025, demi peningkatan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun mendatang. Diharapkan seluruh jajaran di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat mendukung tercapainya hasil kegiatan (*output*) secara optimal melalui koordinasi dan sinergisme kegiatan institusi pada tahun anggaran 2026.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 disusun semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi bagi tersusunnya Rencana Kerja ini, kami ucapkan terima kasih.

Palembang, 2026

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Selatan,



ISMAIL FAHMI, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196812151989031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2026 (s.d Triwulan II Tahun 2026) dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2026	7
2.2 Penyajian Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja	11
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	14
2.4 Reviu terhadap rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026	15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026.....	15
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	17
3.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	17
BAB IV PENUTUP	35

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Pelaksanaan per Komponen Belanja APBD BKD Prov. Sumsel Tahun 2025.....	6
Tabel 3.1 Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	18
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah memberikan jawaban yang lebih jelas dan tegas tentang kewenangan daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan daerah menurut prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, daerah dapat melakukan inisiatif sendiri sesuai dengan batasan-batasan tertentu serta dalam kerangka ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang pada pelaksanaannya ditentukan pada tiga asas penyelenggaraan, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Untuk pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi sebagai dasar pelaksanaannya telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil

Daerah dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan pegawai negeri yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus memberikan pelayanan prima sesuai dengan fungsi dan tugasnya kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sudah tidak dapat diragukan lagi bahwa pembangunan sumberdaya aparatur adalah ditujukan untuk terciptanya aparat yang selalu siap memberikan pelayanan yang berkualitas prima sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah maupun masyarakat. Aparat Pemerintah diharapkan dengan kemampuannya yang meningkat dapat mendayagunakan seluruh kapasitasnya mengelola dengan sebaik-baiknya segala macam sumber-sumber pelayanan termasuk infrastruktur administratif yang dimiliki demi pemberian pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan maksud tersebut di atas diperlukan PNS yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Untuk itu dibutuhkan suatu pembinaan PNS melalui berbagai program yang terencana dengan baik dan berkelanjutan sehingga benar-benar dapat menunjang bagi terciptanya Pegawai Negeri Sipil yang profesional.

1.2. Landasan Hukum

Kedudukan dan dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU Nomor 23 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 185);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;
 15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045;
 16. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026;
 17. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029;
 18. Rencana Strategis (Resntra) BKD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan jangka pendek serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lembaga Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2026.

Penyusunan Renja bertujuan sebagai alat kendali dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan dinas, untuk mengetahui capaian hasil, kemajuan dan kendala guna mewujudkan visi dan misi dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

- 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2026 (s.d Triwulan II Tahun 2026) dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2026

- 2.2 Penyajian Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Reviu terhadap rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.3 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- 3.4 Komponen Belanja Tahun 2026 Perubahan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2026 (s.d Triwulan II Tahun 2026) dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2026

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam pelaksanaannya maka setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi. Menindaklanjuti hal itu, pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan triwulan II tahun 2026 pun harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan triwulan II Tahun 2026 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan program dan kegiatan, dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

- a. Sinergitas dengan RPJMN dan RPJMD
- b. Konsisten dengan Rencana Strategis
- c. Program kegiatan yang diutamakan
- d. Masalah yang ada dan perlu diatasi
- e. Tujuan dan sasaran serta prioritas untuk mewujudkannya.

Sedangkan pada Penyusunan Renja Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 juga memperhatikan Keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan

konsistensi pelaksanaan program yang telah ditetapkan termasuk hal-hal yang masih harus diperbaiki dan ditingkatkan.

Bahwa pada tahun 2026, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengelola 2 (dua) program, 11 kegiatan, dan 26 Sub kegiatan terdapat 1 (satu) Program yang berkaitan langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu Program Kepegawaian.

Hasil evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2026 pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.1 Realisasi Pelaksanaan per Komponen Belanja APBD
BKD Prov. Sumsel Tahun 202 (per TW II)

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d Bulan ini	Realisasi s.d. Bulan Ini	Target s.d Bulan ini	Realisasi s.d. Bulan ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/2* 100)	(6)	(7)
Belanja Daerah	19.277.475.302	7.977.131.121	64.37	41.49	64.37	42.99
Belanja Operasi	19.020.896.302	7.977.131.121	43.75	41.94	43.75	42.99
- Belanja Pegawai	16.534.430.622	7.356.687.584	49.00	44.49	49.00	44.49
- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.492.123.622	3.351.975.296	50.00	51.63	50.00	51.63
- Belanja Pegawai Lainnya	10.042.307.000	4.004.712.288	48.00	39.88	48.00	39.88
- Belanja Barang/Jasa	2.486.465.680	620.443.537	38.50	24.95	38.50	33.00
Belanja Modal	206.579.000	-	85.00	-	85.00	-

1) Realisasi Belanja Daerah

Realisasi Keuangan Total Belanja Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan triwulan ini sebesar Rp. **7.977.131.121,-** atau **41.49%** dan realisasi fisik **42.99%**.

2) Realisasi Belanja Operasi

Realisasi Keuangan Belanja Operasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan triwulan ini sebesar Rp. **7.977.131.121,-** atau **41.94%** dan realisasi fisik **42.99%**.

3) Realisasi Belanja Modal

Realisasi Keuangan Belanja Modal Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan triwulan ini sebesar Rp **0,-** atau **0%** dan realisasi fisik **0%**.

i. Realisasi Keuangan

1. Rendah, Kegiatan dengan realisasi 0 – 65 % : 26 subkegiatan
2. Sedang, Kegiatan dengan realisasi 66 – 90% : - subkegiatan
3. Tinggi, Kegiatan dengan realisasi > 90% : - subkegiatan

ii. Realisasi Fisik

1. Rendah, Kegiatan dengan realisasi 0 – 65 % : 25 subkegiatan
2. Sedang, Kegiatan dengan realisasi 66 – 90 % : - subkegiatan
3. Tinggi, Kegiatan dengan realisasi > 90 % : 1 subkegiatan

a) Indikator Kinerja SKPD

Indikator Kinerja SKPD berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 :

Realisasi Indikator Kinerja SKPD (berdasarkan RENSTRA)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Realisasi	Capaian	Ket
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Layanan Adm Kepegawaian	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	%	90	55.15	61.27	Target belum tercapai karena penilaian masih berjalan hingga Desember 2026
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengembangan Karir ASN	Persentase pengembangan karir ASN yang sesuai dengan kompetensinya	%	88	80.98	90.02	Target belum tercapai karena penilaian masih berjalan hingga Desember 2026
3	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	%	90	67.87	75.41	Target belum tercapai karena penilaian masih

							berjalan hingga Desember 2026
4	Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik	%	90	44.07	48.96	Target belum tercapai karena penilaian masih berjalan hingga Desember 2026

c) Indikator Kinerja SKPD

Indikator Kinerja SKPD berdasarkan Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 :

Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja (IKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Realisasi	Capaian	Ket
1	Meningkatkan Profesionalitas ASN Pemprov. Sumsel	Nilai IP ASN	%	81	82.79	100	Sampai dengan Triwulan II ini telah tercapai
		Nilai Penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	%	89	-	-	Masih menunggu penilaian dari BKN Pusat (belum rilis)
2	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Sakip Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan	%	85	-	-	Masih dalam proses pengumpulan data (evaluasi belum dilaksanakan)

d) Indikator RPD

Indikator RPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

Pencapaian Target Capaian Indikator Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2024		Realisasi Kinerja 2025		Kinerja 2026			Faktor Penghambat/ Faktor Pendorong
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi s.d TW I	Capaian	
1	Nilai IP ASN	%	76	81,36	81	84,13	81	82.79	100	-
2	Nilai Penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	%	71	94,375	90	88,55	89	-	-	-

2.2. Penyajian Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja

Pada pelaksanaan RPJMD 2025-2029 Visi yang akan diwujudkan, yaitu:

“ SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA ”

“SumSel Maju Terus untuk Semua“, kalimat ini mengandung arti meneruskan program-program yang sudah ada sebelumnya demi tercapainya kondisi pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Untuk mendukung terwujudnya Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka Badan Kepegawaian Daerah mendukung Misi keenam yaitu:

“Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas “

Misi meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas mengandung arti untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan berperan aktif dalam memenuhi Sasaran **Maju Aparatur Profesional dan Berintegritas**.

Berdasarkan telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, maka posisi BKD Provinsi Sumatera Selatan dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Selatan**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra BKD Prov. Sumsel Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian Tahun ke-			
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi yang terisi melalui seleksi terbuka				100.00	100.00	100.00	n/a	45.00	76.36	89.28	n/a	45.00	76.36	89.28	n/a
2	Persentase Jabatan Administrator & Pengawas pada instansi pemerintah yang terisi				100.00	100.00	100.00	n/a	113.12	89.10	94.81	n/a	100	89.10	94.81	n/a
3	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu yang terisi				9.796	10.311	10.796	n/a	9.874	10.886	11.319	n/a	100	100	100	n/a
4	Persentase Disiplin ASN				98.30	98.40	98.50	n/a	96.35	98.40	98.52	n/a	98.02	100.00	100.00	n/a

*nilai dalam %

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kapabilitas Birokrasi	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	76	76	77	77	77	78	78	
		Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	NA	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	NA	89%	90%	91%	92%	92%	93%	
		Persentase pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	NA	85%	88%	90%	92%	93%	95%	
		Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik	NA	90%	90%	91%	92%	92%	92%	
		Nilai Penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)								
		Nilai SAKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan								

Dari tabel diatas maka urusan kepegawaian yang menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan masuk dalam RPJMD tersebut adalah pada Program Kepegawaian. Dengan demikian, secara umum kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat berjalan lancar.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Berkaitan dengan peran Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam Meningkatkan kualitas ASN yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif, Isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa dating dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berikut ini merupakan hasil rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemenuhan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan pemutakhiran data mandiri ASN di lingkungan Pemprov. Sumsel.

2. Tantangan digitalisasi penuh (paperless) pelayanan administrasi serta standardisasi kepatuhan regulasi manajemen kepegawaian.
3. Perlunya penguatan akuntabilitas kinerja instansi (SAKIP), efisiensi tata kelola internal, dan sinkronisasi penganggaran di lingkungan BKD.

2.4 Reviu terhadap rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026

Review terhadap rancangan Perubahan RKPD tahun 2026 berkaitan dengan program dan kegiatan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026 dengan rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dijabarkan dengan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2026 akan mengakomodir usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun dari Pemerintahan Provinsi

yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari pengamatan lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Provinsi Sumatera Selatan. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan di dalam menelaah usulan dari publik tetap mengacu dan mensinergikan pada tujuan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yang sedang melaksanakan percepatan peningkatan pelayanan publik.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Upaya pencapaian sasaran yang ingin dicapai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dijabarkan dalam 2 Program, 10 Kegiatan serta 26 Sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun kegiatan tersebut meliputi:

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
G	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
17	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
18	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
19	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
20	Pengelolaan Data Kepegawaian
H	Mutasi dan Promosi ASN
21	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
22	Pengelolaan Promosi ASN
I	Pengembangan Kompetensi ASN
23	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
24	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
J	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
25	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
26	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
27	Pembinaan Disiplin ASN

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :
 - 1) Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
 - 2) Pencapaian Renstra OPD;
 - 3) Pelaksanaan Tupoksi OPD

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan antara lain meliputi :
 - Jumlah program sebanyak 2 program dan jumlah kegiatan sebanyak 1 kegiatan dan 26 sub kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan terfokus di Sumatera Selatan.
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 18.178.994.680.

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Daerah							23.345.436.961,00	20.589.997.613,00	18.178.994.680,00	-5.166.442.281,00							27.013.085.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							23.345.436.961,00	20.589.997.613,00	18.178.994.680,00	-5.166.442.281,00							27.013.085.000,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN							23.345.436.961,00	20.589.997.613,00	18.178.994.680,00	-5.166.442.281,00							27.013.085.000,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	21.412.321.961,00	19.621.517.613,00	16.983.331.117,00	-4.428.990.844,00					Pegawai BKD Prov. Sumsel		23.594.612.000,00	
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya data Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	75.000.000,00	30.000.000,00	21.843.637,00	-53.156.363,00							82.500.000,00	
	5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	75.000.000,00	30.000.000,00	21.843.637,00	-53.156.363,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas		82.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN/Tenaga Administrasi Honorarium serta				100 %	100 %	18.510.845.000,00	18.140.223.622,00	15.386.881.600,00	-3.123.963.400,00							20.700.000.000,00	

			Honorarium Penatausahaan Pengujian																	
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				90 Orang/ Bulan	90 Orang/ Bulan	18.213.125.000,00	18.031.063.622,00	15.285.950.000,00	-2.927.175.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas			20.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	297.720.000,00	109.160.000,00	100.931.600,00	-196.788.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas			700.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan dan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00							0,00	

	5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				5 Orang	5 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan dan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	661.106.961,00	259.642.784,00	273.066.273,00	-388.040.688,00							1.227.000.000,00	
	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas			17.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	60.000.000,00	48.000.000,00	-102.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas			370.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	181.606.961,00	72.642.784,00	50.849.949,00	-130.757.012,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas			320.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

	5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	285.000.000,00	114.000.000,00	168.216.324,00	-116.783.676,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas			510.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

	5.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	17.500.000,00	7.000.000,00	0,00	-17.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan dan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	560.570.000,00	30.285.000,00	30.285.000,00	-530.285.000,00							250.000.000,00	
	5.03.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				4 Unit	4 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				4 Unit	1 Unit	60.570.000,00	30.285.000,00	30.285.000,00	-30.285.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Peralatan Penunjang Perangkat Daerah				100 %	100 %	953.800.000,00	880.072.207,00	844.760.164,00	-109.039.836,00							985.112.000,00	

	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-1.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas			8.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	380.000.000,00	346.472.207,00	319.962.664,00	-60.037.336,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas			400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	570.800.000,00	532.400.000,00	523.597.500,00	-47.202.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas			577.112.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah				100 %	100 %	501.000.000,00	281.294.000,00	426.494.443,00	-74.505.557,00							350.000.000,00	
	5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	23 Unit	316.000.000,00	91.000.000,00	107.983.176,00	-208.016.824,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

	5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	35.000.000,00	14.000.000,00	9.800.000,00	-25.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	176.294.000,00	308.711.267,00	158.711.267,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN Meningkatnya kualitas				88 90 % 90 88 % %	88 90 % 90 88 % %	1.933.115.000,00	968.480.000,00	1.195.663.563,00	-737.451.437,00					Masyarakat dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	3.418.473.000,00	

			penilaian kinerja ASN Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN																	
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN				100 %	100 %	780.700.000,00	433.180.000,00	369.185.416,00	-411.514.584,00							1.089.720.000,00	
	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				4 Dokumen	4 Dokumen	256.000.000,00	102.400.000,00	58.063.990,00	-197.936.010,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas			400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	127.980.000,00	24.992.000,00	19.177.426,00	-108.802.574,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas			310.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				10000 Dokumen	10000 Dokumen	294.720.000,00	280.488.000,00	271.944.000,00	-22.776.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas			259.720.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				14500 Dokumen	14500 Dokumen	102.000.000,00	25.300.000,00	20.000.000,00	-82.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas			120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase terisinya Jabatan, rotasi dan mutasi				100 %	100 %	685.215.000,00	269.366.000,00	556.226.147,00	-128.988.853,00							1.254.356.000,00	
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Laporan	1 Laporan	49.415.000,00	12.366.000,00	9.052.500,00	-40.362.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas			54.356.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	635.800.000,00	257.000.000,00	547.173.647,00	-88.626.353,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas			1.200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN				100 %	100 %	309.000.000,00	229.094.000,00	226.494.000,00	-82.506.000,00							510.000.000,00	
	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola				4 Dokumen	4 Dokumen	284.000.000,00	219.094.000,00	219.094.000,00	-64.906.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas			450.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

	5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina				500 Orang	500 Orang	25.000.000,00	10.000.000,00	7.400.000,00	-17.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				100 %	100 %	158.200.000,00	36.840.000,00	43.758.000,00	-114.442.000,00							564.397.000,00	
	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	31.100.000,00	8.440.000,00	7.558.000,00	-23.542.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas			100.897.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				500 Orang	500 Orang	32.100.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00	-24.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas			313.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				14000 Orang	14000 Orang	95.000.000,00	16.400.000,00	28.200.000,00	-66.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	J U M L A H								23.345.436.961,00	20.589.997.613,00	18.178.994.680,00	-5.166.442.281,00							27.013.085.000,00	

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2026 Badan Kepegawaian Daerah merupakan tindak lanjut dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, Materi Rencana Kerja ini berisi rencana dari serangkaian program strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang sangat tergantung pada dana yang tersedia dan sumber daya manusia yang memadai. Disamping itu diperlukan pula adanya kerjasama antara Pemerintah Pusat, Jajaran Dinas/Badan/Instansi Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disadari juga bahwa dalam penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel ini, belum pada taraf sempurna dan belum memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan, karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini dimasa yang akan datang sangat kami harapkan agar tercapai kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel yang baik lagi.

Palembang, 2026
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Selatan,

ISMAIL FAHMI, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196812151989031002